

BPKD

*RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
EDISI REVISI
2017-2022*

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2019**



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu perangkat daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah, telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022. Jika diperlukan, dapat dilakukan reviu terhadap dokumen Renstra, antara lain dalam rangka melakukan penyelarasan terhadap Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan oleh Tim Reviu BPKD dengan Tim SAKIP Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat. Untuk maksud itulah dokumen Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 Edisi Revisi ini disusun.

Penyusunan Renstra Edisi Revisi ini mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, sehingga akan tercapai sinergi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka membantu mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Pada akhirnya diharapkan dapat terwujud Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera”.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi sehingga dokumen Renstra Edisi Revisi ini dapat kami selesaikan. Akhirnya, semoga dokumen ini dapat bermanfaat.

Liwa, 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

Drs. DAMAN NASIR, M.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680701 198901 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.1.1 Tugas	7
2.1.2 Fungsi	7
2.1.3 Rincian Tugas.....	8
2.1.4 Struktur Organisasi.....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.2.1 Aparatur.....	10
2.2.2 Sarana dan Prasarana	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.4 Tantangan dan Peluang	18
2.4.1 Tantangan	18
2.4.2 Peluang	19

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan	21
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	23
3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah	25
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	27
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan.....	38
4.2 Sasaran	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	45
BAB VIII PENUTUP	47
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1.....	9

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.	13
Tabel 2.2.	16
Tabel 3.1.	22
Tabel 4.1.	39
Tabel 5.1.	42
Tabel 7.1.	46

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun rencana strategis merupakan tindakan atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi organisasi selama jangka waktu tertentu. Dalam kaitannya dengan ini, maka Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan yang berisi langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra OPD disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra OPD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembangunan daerah, agar memiliki arah yang jelas, terarah, dan berkesinambungan. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah, perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai arahan kinerja untuk kurun waktu lima tahun yakni tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana halnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat. Untuk itulah Renstra BPKD ini disusun.

Penyusunan Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat dilakukan melalui berbagai tahap, dimulai dari tahap Persiapan Penyusunan Renstra dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra OPD, penyusunan agenda kerja Tim, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Dilanjutkan dengan tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra OPD yang mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran OPD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja OPD, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan OPD serta program dan pendanaan indikatif dalam Rancangan Awal RPJMD.

Tahap selanjutnya adalah Penyusunan Rancangan Renstra OPD, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renstra OPD, dan diakhiri dengan tahap Penetapan Renstra OPD. Tahap Penetapan Renstra meliputi Verifikasi Rancangan Akhir Renstra oleh Bappeda, penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra oleh Kepala OPD, dan Penetapan Renstra OPD dengan Peraturan Kepala Daerah.

Jika diperlukan, dapat dilakukan reviu terhadap dokumen Renstra, antara lain dalam rangka melakukan penyelarasan terhadap Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan oleh Tim Reviu BPKD dengan Tim SAKIP Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat. Renstra Edisi Revisi ini mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dengan memperhatikan hasil Reviu sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Reviu, dalam upaya melaksanakan misi serta mewujudkan visi Kabupaten Lampung Barat yang dituangkan di dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404);
14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat Edisi Revisi ini dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD yang diselaraskan dengan RPJMD, yang diemban oleh seluruh aparatur, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga vertikal, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, agar terwujud keberhasilan pelaksanaannya secara sinergis, dan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra Edisi Revisi ini adalah :

1. Menetapkan misi yang diemban BPKD, serta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program yang sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih periode 2017-2022, agar kegiatan pembangunan daerah menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah, efektif, mudah dipantau, dan mudah diukur pencapaian hasilnya.

2. Menetapkan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra ini, selanjutnya diharapkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangannya dan hambatannya, dan ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya.
3. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur BPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 Edisi Revisi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Lampung Barat
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Lampung Barat

2.1.1 Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, tugas BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPKD Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Rincian Tugas

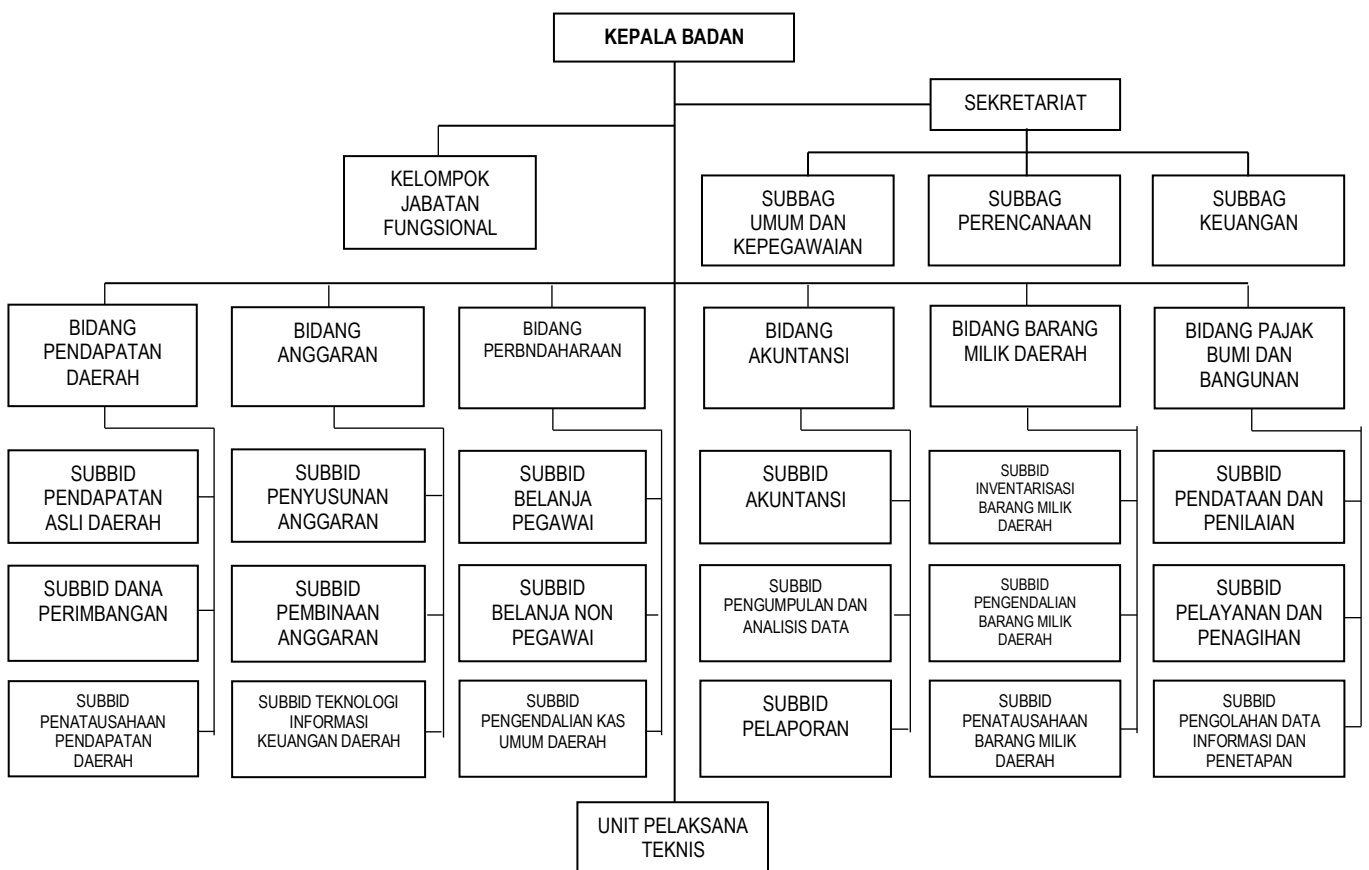
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, BPKD Kabupaten Lampung Barat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
2. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Membuat dan menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
7. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan kekayaan daerah;
8. Membagi tugas atau kegiatan pada bawahan sekaligus memberi petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
10. Menilai prestasi kerja PNS di lingkup Badan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur organisasi BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Lampung Barat

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKD Kabupaten Lampung Barat didukung oleh sumber daya aparatur. Berikut adalah rincian sumber daya aparatur BPKD :

1. Jumlah Pegawai.

Jumlah pegawai BPKD adalah 44 orang.

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Ruang.

Jumlah Pegawai BPKD menurut Golongan Ruang :

- Pegawai Golongan IV : 6 orang
- Pegawai Golongan III : 31 orang
- Pegawai Golongan II : 6 orang
- Pegawai Golongan I : 1 orang

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPKD berdasarkan latar belakang pendidikan adalah :

- Sarjana Strata 2 (S2) : 9 orang
- Sarjana Strata 1 (S1) : 27 orang
- D III : 3 orang
- SLTA sederajat : 4 orang
- SD sederajat : 1 orang

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Diklat Penjurangan Struktural Tertinggi.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Diklat Penjurangan Struktural Tertinggi adalah :

- Golongan IV/c : 1 Orang (Diklat Pim. II)
- Golongan IV/b : 1 Orang (Diklat Pim. III)
- Golongan IV/a : 1 Orang (Diklat Pim. III)
- Golongan III/d : 1 Orang (Diklat Pim. III)
- Golongan IV/a : 3 Orang (Diklat Pim. IV)
- Golongan III/d : 6 Orang (Diklat Pim. IV)
- Golongan III/c : 1 Orang (Diklat Pim. IV)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya aparatur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah, BPKD Kabupaten Lampung Barat juga didukung oleh sarana dan prasarana berupa gedung dan bangunan, mesin dan peralatan, instalasi dan aset lainnya, yang semuanya tercantum di dalam neraca dinas. Berikut adalah rincian sarana dan prasarana BPKD berdasarkan kelompok besarnya :

1. Mesin dan peralatan :

- Alat berat : 2 unit
- Kendaraan roda empat : 6 unit
- Kendaraan roda dua : 22 unit
- Alat bengkel : 3 unit
- Alat ukur : 2 unit
- Alat kantor dan rumah tangga : 1.488 buah
- Alat pertanian : 1 buah
- Alat studio dan komunikasi : 28 unit

2. Gedung dan bangunan :

- Bangunan gedung : 647 m²
- Bangunan monumen : 276 buah

3. Jalan, jembatan, bangunan air, jaringan dan instalasi :

- Jaringan/instalasi : 2 unit

4. Aset tetap lainnya :

- Buku : 1 paket

5. Aset tak berwujud : 21 unit

6. Aset lain-lain : 318 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPKD Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Sesuai dengan tugas tersebut, BPKD memiliki fungsi dalam penyusunan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; serta pembinaan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Adapun rincian tugas yang dilaksanakan oleh BPKD antara lain :

1. Merencanakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Membuat rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Melaksanakan fungsi Bendaharawan Umum Daerah (BUD) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Membuat dan menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan kekayaan daerah.

Pada masa renstra yang lalu (2012-2017), BPKD memiliki indikator kinerja sebagai acuan keberhasilan tugas yang diemban. Indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Kualitas sarana dan prasarana kantor yang baik.
2. ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Keikutsertaan seluruh aparatur keuangan daerah dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan.
4. Persentase peningkatan pendapatan daerah.
5. Persentase peningkatan PAD.
6. Penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
7. Nilai hasil pembinaan pengelolaan keuangan daerah.
8. Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.
9. Pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan BPKD pada masa renstra yang lalu (2012-2017) dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2012-2017

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Kualitas sarana dan prasarana kantor yang baik.	---	---	---	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan.	---	---	---	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Keikutsertaan seluruh aparatur keuangan daerah dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan.	---	---	---	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah.	---	---	---	3%	3%	3%	3%	3%	15,25%	-26,51%	39,32%	23,68%	1,27%	508,33%	-883,67%	1310,67%	789,33%	42,33%
5	Persentase peningkatan PAD.	---	---	---	3%	3%	3%	3%	3%	27,11%	27,22%	9,72%	15,94%	73,96%	903,67%	907,33%	324,00%	531,33%	2465,33%
6	Penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.	---	---	---	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Nilai hasil pembinaan pengelolaan keuangan daerah.	---	---	---	50	60	70	70	70	56,46	62,62	66	71,89	71,14	112,92%	104,37%	94,29%	102,70%	101,63%
8	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	---	---	---	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007.	---	---	---	67%	67%	67%	100%	100%	60%	67%	100%	100%	100%	90%	100,50%	150%	100%	100%

Jika dilihat pada Tabel 2.1, BPKD dapat mencapai seluruh target kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana sebagian besar mencapai realisasi 100%. Namun ada dua indikator kinerja yang rasio capaian kinerja setiap tahunnya cukup besar dan fluktuatif, yaitu :

1. Persentase peningkatan Pendapatan Daerah (dengan pengecualian capaian tahun ke-2 yang minus).
2. Persentase peningkatan PAD.

Persentase peningkatan Pendapatan Daerah tidak mencapai target pada tahun ke-2 (tahun 2014) dikarenakan adanya pemekaran Kabupaten Lampung Barat dengan terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. Dengan pemekaran ini, maka luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat (termasuk jumlah pegawai) berkurang, begitu pula dengan sumber retribusi daerah atas pemakaian aset pemerintah daerah yang mengalami penurunan. Akibatnya dari sisi pendapatan, terjadi penurunan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan retribusi daerah.

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan BPKD dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

Kabupaten Lampung Barat selama 8 tahun berturut-turut meraih penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dilakukan dengan baik, memperhatikan prioritas daerah, dan taat aturan.

2. Pengalokasian anggaran yang baik.

Meski saat ini tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi di mana alokasi PAD Kabupaten Lampung Barat terhadap total pendapatan daerah masih rendah, namun Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat mengelola APBD dengan baik. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki *cash flow* yang sehat dan tidak pernah mengalami gagal bayar untuk alokasi belanja yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses penganggaran dilakukan dengan baik, memperhatikan prioritas daerah, sesuai kebutuhan, dan taat aturan.

3. Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Dengan didaerahkannya PBB, yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

4. Sumber daya.

BPKD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana. Kedua sumber daya tersebut dengan keterbatasannya dapat dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

Selanjutnya anggaran dan realisasi pendanaan atas pelayanan OPD dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2012-2017

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	1.790.390.850	2.164.389.550	2.897.731.250	3.086.575.750	3.339.818.850	1.658.222.500	1.974.437.000	2.518.943.129	2.844.578.062	3.241.886.726	92,62%	91,22%	86,93%	92,16%	97,07%	16,87%	18,25%
Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data.	455.847.125	620.606.250	857.364.900	853.762.800	893.771.000	319.705.645	578.519.013	778.213.426	804.814.800	886.850.350	70,13%	93,22%	90,77%	94,27%	99,23%	18,33%	29,06%
Penyuluhan terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB.	50.000.000	35.150.000	90.250.000	62.000.000	109.840.000	39.716.000	35.150.000	89.507.500	59.981.750	109.839.250	79,43%	100%	99,18%	96,74%	100%	21,74%	28,96%
Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB.	576.838.550	573.796.850	438.150.850	510.613.850	539.563.000	531.281.222	234.714.600	420.974.430	389.998.299	465.276.850	92,10%	40,91%	96,08%	76,38%	86,23%	-1,66%	-3,26%

Jika dilihat pada Tabel 2.2, realisasi pendanaan pelayanan BPKD dapat dikategorikan baik, di mana keempat program prioritas yang dilaksanakan rata-rata mencapai realisasi di atas 75% setiap tahunnya selama 5 tahun, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dua program mencapai realisasi rata-rata di atas 90%.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki rasio realisasi dan anggaran yang baik setiap tahunnya, dengan rata-rata realisasi di atas 90% (pengecualian pada tahun ketiga dengan rasio 86,93%).

Program Penyuluhan terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB memiliki rasio realisasi dan anggaran yang baik setiap tahunnya, dengan rata-rata realisasi di atas 90% (pengecualian pada tahun kesatu dengan rasio 79,43%).

2. Satu program mencapai realisasi rata-rata 89,5%.

Program Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data memiliki rasio realisasi dan anggaran yang baik setiap tahunnya, dengan rata-rata realisasi di atas 90% (pengecualian pada tahun kesatu dengan rasio 70,13%).

3. Satu program mencapai realisasi rata-rata di atas 75%.

Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB memiliki rasio realisasi dan anggaran yang baik setiap tahunnya, dengan rata-rata realisasi di atas 75% (pengecualian pada tahun kedua dengan rasio 40,91%).

Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB memiliki rasio realisasi dan anggaran yang rendah pada tahun kedua (tahun 2014), hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Program ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu kegiatan Operasional Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Memantau Penerimaan PBB dan kegiatan Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD. Kegiatan pertama mencapai realisasi dana sebesar 44,23%, yang disesuaikan dengan kebutuhan, namun realisasi output mencapai 100% yakni realisasi PAD yang mencapai target.

2. Kegiatan Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD tidak terealisasi. Kegiatan ini tidak terealisasi, dikarenakan penganggaran kegiatan ini adalah dalam rangka evaluasi oleh Tim Terpadu jika ditemukan masalah dalam kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah di lapangan, sementara pada TA. 2014 tidak ada kendala di lapangan di mana realisasi PAD dapat mencapai target.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, BPKD Kabupaten Lampung Barat menghadapi tantangan yang berasal dari luar lingkungannya dan harus dijawab oleh OPD dengan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Tantangan tersebut antara lain :

1. Era globalisasi.

Arus globalisasi yang deras menuntut aparaturnya BPKD untuk meningkatkan kualitas agar tidak tenggelam di dalamnya, namun tentu tanpa harus melunturkan etika dan budaya timur yang dimiliki dalam mengemban tugasnya.

2. Arus informasi dan kemajuan teknologi.

Arus informasi dan kemajuan teknologi memiliki dampak positif dan negatif. Jika dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab maka rentan untuk disalahgunakan, sebaliknya jika dimanfaatkan dengan bijak maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

3. Pencanaan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi yang tengah digalakkan saat ini harus didukung oleh seluruh unsur pemerintahan baik pusat maupun daerah. Inti dari reformasi birokrasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan profesional yang didukung

oleh aparatur yang memiliki kapabilitas dan mumpuni. Reformasi birokrasi dapat diawali dengan rekrutmen pegawai yang bebas dari praktik KKN, dilanjutkan dengan peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan pembangunan.

2.4.2 Peluang

Selain dihadapkan dengan tantangan, BPKD Kabupaten Lampung Barat juga memiliki peluang yang dapat mendukung pelaksanaan tugas OPD, antara lain :

1. Era otonomi daerah.

Otonomi daerah membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia, dimana Daerah Otonom (Kabupaten/Kota) dituntut untuk lebih mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan standar, norma dan kebijakan pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama. Peran BPKD dalam hal ini adalah sebagai pembantu Kepala Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

2. Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi telah merambah sampai ke Kabupaten kecil seperti Kabupaten Lampung Barat. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

3. Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Dengan didaerhkannya PBB, yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

4. Sumber daya.

BPKD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD, meskipun harus diakui bahwa kondisi saat ini dirasa masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

BAB III.
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat, antara lain :

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

Saat ini, BPKD Kabupaten Lampung Barat masih kekurangan aparatur mengingat volume dan beban pekerjaan yang membutuhkan dukungan lebih banyak personil. Selain itu, sejalan dengan perkembangan pendayagunaan aparatur negara, aparatur BPKD perlu lebih meningkatkan kualitas menyangkut tugas pelayanan dan pemahaman penatausahaan bidang pendapatan, keuangan dan barang milik daerah.

2. Sarana dan prasarana kantor.

BPKD Kabupaten Lampung Barat juga masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam rangka pelayanan administrasi yang cepat, akurat dan memuaskan.

3. Regulasi.

Meski Peraturan Perundangan untuk mendukung tugas dan fungsi BPKD, yakni peraturan perundangan yang saling menunjang dan memperkuat telah memadai, namun pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut masih perlu ditingkatkan.

4. Koordinasi dengan *stake holder*.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKD memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Harus diakui saat ini koordinasi antar*stake holder* masih belum optimal, yang terkadang menghambat penyelesaian tugas. Koordinasi dan rekonsiliasi antar*stake holders* ini diupayakan terus ditingkatkan.

Selanjutnya pemetaan permasalahan dalam rangka penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.	BPKD Kabupaten Lampung Barat masih kekurangan aparatur mengingat volume dan beban pekerjaan yang membutuhkan dukungan lebih banyak personil.	Belum meratanya penempatan pegawai yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh BPKD.
2.	Sarana dan prasarana kantor.	BPKD Kabupaten Lampung Barat masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam rangka pelayanan administrasi yang cepat, akurat dan memuaskan.	Kemampuan keuangan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat, dimana pengadaan sarana dan prasarana yang memadai belum menjadi prioritas daerah.
3.	Regulasi.	Pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut masih perlu ditingkatkan.	Sosialisasi yang diberikan kepada aparatur ataupun masyarakat, baik melalui kegiatan-kegiatan formal maupun melalui media lain yang berupa himbauan, informasi, pengumuman dan lain sebagainya, belum tepat sasaran.
4.	Koordinasi dengan <i>stake holder</i> .	Koordinasi antar <i>stake holder</i> masih belum optimal, yang terkadang menghambat penyelesaian tugas.	Pegawai belum memahami tugas dan fungsi jabatan yang diembannya, dan kurangnya rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat periode 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat, yaitu :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumber daya lokal.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPKD mengemban Misi 4, yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik”, dengan Tujuan “Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa”, dan Sasaran “Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat”.

Berdasarkan pemetaan Program Unggulan (Pitu Program) di dalam RPJMD, BPKD mendukung Program Unggulan “Masyarakat Berdaya Saing dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas antara lain :

1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data.
3. Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak & Retribusi Daerah serta PBB.
4. Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB.

Selanjutnya, faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang diamanatkan oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

- Rendahnya PAD yang mengindikasikan besarnya ketergantungan daerah pada pusat. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas daerah, agar dapat mencapai pemerataan pembangunan daerah.
- BPKD Kabupaten Lampung Barat masih membutuhkan sumber daya aparatur pemerintah yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- BPKD Kabupaten Lampung Barat masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam rangka pelayanan administrasi yang cepat, akurat dan memuaskan.
- Meski Peraturan Perundangan untuk mendukung tugas dan fungsi BPKD, yakni peraturan perundangan yang saling menunjang dan memperkuat telah memadai, namun pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut masih perlu ditingkatkan.
- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKD memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Harus diakui, saat ini koordinasi antar *stake holders* masih belum optimal, yang terkadang menghambat penyelesaian tugas. Koordinasi dan rekonsiliasi antar *stake holders* ini diupayakan terus ditingkatkan meski kadang terkendala jauhnya jarak dan terhambatnya jalur komunikasi.

2. Faktor Pendorong

- Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi telah merambah sampai ke Kabupaten kecil seperti Kabupaten Lampung Barat. Kemajuan teknologi

yang dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dirasa sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

- Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

Kabupaten Lampung Barat selama 8 tahun berturut-turut meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Prestasi ini selain merupakan capaian daerah yang patut diapresiasi, juga menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi BPKD untuk terus memantapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

- Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Dengan didaerhkannya PBB, yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah.

- Sumber daya.

BPKD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan sasaran jangka menengah pada Renstra BPKD, ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan BPKD antara lain :

1. Kondisi wilayah yang relatif luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah Lampung Barat yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor. Meskipun

pada masa Renstra yang lalu target PAD selalu tercapai, namun dengan kondisi wilayah Lampung Barat tersebut dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan penagihan PAD pada tahun-tahun yang akan datang.

2. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang belum optimal.
3. Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai.
4. Pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut yang belum optimal.
5. Koordinasi dengan *stake holders* yang belum optimal.

Sedangkan faktor-faktor pendorong pelaksanaan pelayanan BPKD antara lain :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

Kabupaten Lampung Barat selama 8 tahun berturut-turut meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Prestasi ini selain merupakan capaian daerah yang patut diapresiasi, juga menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi BPKD untuk terus memantapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Dengan didaerahkannya PBB, yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah.

3. Sumber daya.

BPKD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat.

Berkaitan dengan RTRW, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan.

Tujuan RTRW Kabupaten Lampung Barat adalah “Mewujudkan ruang Kabupaten yang berkelanjutan dan berdaya saing berbasis agro, energi terbarukan, dan pariwisata”.

Dengan melihat RTRW tersebut, faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

5. Faktor Penghambat

- Kondisi wilayah Lampung Barat yang relatif luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor secara umum dapat mengancam stabilitas pemerintahan, sedangkan khusus di bidang keuangan membutuhkan alokasi khusus dalam penganggaran, misalnya penyediaan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana (sementara sumber pendapatan daerah terbatas).
- Rendahnya PAD yang mengindikasikan besarnya ketergantungan daerah pada pusat. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan tujuan dalam RTRW, agar dapat mencapai pemerataan pembangunan daerah.
- BPKD Kabupaten Lampung Barat masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam rangka pelayanan administrasi yang cepat, akurat dan memuaskan.
- Meski Peraturan Perundangan untuk mendukung tugas dan fungsi BPKD, yakni peraturan perundangan yang saling menunjang dan memperkuat telah memadai, namun pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut masih perlu ditingkatkan.
- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKD memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Harus diakui, saat ini koordinasi antar *stake holders* masih belum optimal, yang terkadang menghambat penyelesaian tugas. Koordinasi dan rekonsiliasi antar *stake holders* ini diupayakan terus ditingkatkan meski kadang terkendala jauhnya jarak dan terhambatnya jalur komunikasi.

6. Faktor Pendorong

- Era otonomi daerah. Peran BPKD dalam hal ini adalah sebagai pembantu Kepala Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

- Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi telah merambah sampai ke Kabupaten kecil seperti Kabupaten Lampung Barat. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dirasa sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

- Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Dengan didaerahkannya PBB, yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah.

- Sumber daya.

BPKD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

Sementara itu dari implikasi KLHS, faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dengan menggunakan analisis SWOT, yang terbagi ke dalam 2 lingkungan strategis, yaitu :

1. Lingkungan internal dari dalam organisasi, terdiri dari :

- a. Kekuatan (*Strength*)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKD Kabupaten Lampung Barat memiliki berbagai potensi yang jika dimanfaatkan secara optimal akan menjadi kekuatan organisasi dalam mencapai kinerja yang baik, di antaranya:

- Sumber daya.

BPKD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

- Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

Kabupaten Lampung Barat selama 8 tahun berturut-turut meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Prestasi ini selain merupakan capaian daerah yang patut diapresiasi, juga menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi BPKD untuk terus memantapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

- Pengalokasian anggaran yang baik.

Meski saat ini tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi di mana alokasi PAD Kabupaten Lampung Barat terhadap total pendapatan daerah masih rendah, namun Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat mengelola APBD dengan baik. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki *cash flow* yang sehat dan tidak pernah mengalami gagal bayar untuk alokasi belanja yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses penganggaran dilakukan dengan baik, memperhatikan prioritas daerah, sesuai kebutuhan, dan taat aturan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat yang menjadi kelemahannya, antara lain :

- Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

Selain menjadi kekuatan, sumber daya aparatur juga menjadi kelemahan BPKD. Saat ini, BPKD masih

kekurangan aparatur mengingat volume dan beban pekerjaan yang membutuhkan dukungan lebih banyak personil. Selain itu, sejalan dengan perkembangan pendayagunaan aparatur negara, aparatur BPKD perlu lebih meningkatkan kualitas menyangkut tugas pelayanan dan pemahaman penatausahaan bidang pendapatan, keuangan dan barang milik daerah.

- Sarana dan prasarana kantor.

BPKD Kabupaten Lampung Barat juga masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam rangka pelayanan yang cepat, akurat dan memuaskan.

- Regulasi.

Meski Peraturan Perundangan untuk mendukung tugas dan fungsi BPKD, yakni peraturan perundangan yang saling menunjang dan memperkuat telah memadai, namun pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut masih perlu ditingkatkan.

- Koordinasi dengan *stake holders*.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKD memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Harus diakui, saat ini koordinasi antar *stake holders* masih belum optimal, yang terkadang menghambat penyelesaian tugas. Koordinasi dan rekonsiliasi antar *stake holders* ini diupayakan terus ditingkatkan.

2. Lingkungan eksternal dari luar organisasi, terdiri dari :

a. Peluang (*Opportunity*)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKD Kabupaten Lampung Barat menghadapi tantangan yang berasal dari luar lingkungannya dan harus dijawab oleh OPD dengan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Tantangan tersebut antara lain :

- Era globalisasi.

Arus globalisasi yang deras mau tidak mau menuntut aparaturnya BPKD untuk meningkatkan kualitas agar tidak tenggelam di dalamnya, namun tentu tanpa harus melunturkan etika dan budaya timur yang dimiliki dalam mengemban tugasnya.

- Era otonomi daerah.

Otonomi daerah membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia, dimana Daerah Otonom (Kabupaten/Kota) dituntut untuk lebih mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan standar, norma dan kebijakan pemerintah. Peran BPKD dalam hal ini adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

- Arus informasi dan kemajuan teknologi.

Derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi merupakan tantangan selanjutnya yang dihadapi BPKD. Arus informasi dan kemajuan teknologi memiliki dampak positif dan negatif, jika dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab maka rentan untuk disalahgunakan, sebaliknya jika dimanfaatkan dengan bijak maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

- Pencanaan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi yang tengah digalakkan saat ini harus didukung oleh seluruh unsur pemerintahan baik pusat maupun daerah. Inti dari reformasi birokrasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan profesional yang didukung oleh aparatur yang memiliki kapabilitas dan mumpuni. Reformasi birokrasi dapat diawali dengan rekrutmen pegawai yang bebas dari praktik KKN, bisa juga diawali dengan memperhatikan kondisi dan isu-isu yang dihadapi oleh pemerintahan. Selanjutnya reformasi birokrasi dijawab dengan peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan pembangunan.

- Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah, contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Melalui pendaerahan PBB yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya target PAD.

b. Ancaman (*Threats*)

Selain dihadapkan dengan tantangan dari luar organisasi, BPKD Kabupaten Lampung Barat juga dihadapkan pada ancaman yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Ancaman tersebut antara lain :

- Arus informasi dan kemajuan teknologi.

Derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi selain menjadi tantangan juga dapat menjadi ancaman yang dihadapi BPKD. Arus informasi dan kemajuan teknologi jika dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab maka rentan untuk disalahgunakan.

- Era reformasi.

Era reformasi ditandai dengan kebebasan berpendapat dan tuntutan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, di satu sisi membawa perubahan positif bagi iklim demokrasi dan pemerintahan di Indonesia, namun di sisi lain muncul beragam organisasi dan lembaga yang mengatasnamakan masyarakat dan kebebasan berpendapat tadi yang dalam praktiknya justru

merongrong penegakan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

- Kondisi wilayah.

Kondisi wilayah yang relatif luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah Lampung Barat yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor secara umum dapat mengancam stabilitas pemerintahan sedangkan khusus di bidang keuangan membutuhkan perhatian di sisi anggaran.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi, yang ditinjau antara lain dari :

1. Gambaran pelayanan BPKD.
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra BPKD.
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan BPKD.
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan BPKD.

Dari keempat poin tinjauan tersebut, dapat disimpulkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dilakukan oleh BPKD sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor Penghambat

Faktor ini, baik itu disebut sebagai tantangan, permasalahan, kelemahan, ataupun ancaman, terdiri dari :

- Kondisi wilayah yang relatif luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah Lampung Barat yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor.
- Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang belum optimal.
- Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai.

- Pemahaman aparaturnya tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparaturnya maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut yang belum optimal.
- Koordinasi dengan *stake holders* yang belum optimal.

2. Faktor-Faktor Pendorong

Faktor ini, baik itu disebut sebagai peluang ataupun kekuatan, terdiri dari :

- Era otonomi daerah.

Peran BPKD dalam hal ini adalah sebagai pembantu Kepala Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

- Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi telah merambah sampai ke Kabupaten kecil seperti Kabupaten Lampung Barat. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dirasa sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

- Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Dengan didaerhkannya PBB, yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah.

- Sumber daya.

BPKD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparaturnya dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, harus dirumuskan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD. Inilah yang disebut dengan strategi. Untuk menetapkan strategi tersebut, BPKD Kabupaten Lampung Barat menggunakan metoda analisis SWOT.

Berdasarkan metoda tersebut, diperoleh hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra BPKD ini. Isu-isu strategis BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Indonesia tengah berada pada era kemajuan teknologi informasi yang pesat mengikuti kemajuan teknologi global. Lembaga pemerintah termasuk Pemerintah Daerah pun tidak luput dari kemajuan itu, di mana saat ini kita tengah memasuki era sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi, antara lain dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Saat ini Pemda Kabupaten Lampung Barat telah memiliki berbagai aplikasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Hal ini selain menjadikan pekerjaan lebih efektif, mudah diakses, dan *up to date*, juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada yang saat ini belum terhubung, dalam rangka menyederhanakan dan mengotomatisasi proses kerja.

2. Pemantapan pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Lampung Barat selama 8 tahun berturut-turut (per tahun 2018 ini) meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Prestasi ini selain merupakan capaian daerah yang patut diapresiasi, juga menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi BPKD untuk terus memantapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, juga meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi, karena ke depannya tantangan akan semakin berat, selain bahwa mempertahankan sebuah prestasi lebih sulit dibandingkan meraihnya.

3. Pengelolaan barang milik daerah.

Saat ini, kebutuhan aset yang memadai dan merata bagi seluruh OPD termasuk kecamatan di Kabupaten Lampung Barat belum terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas dan masih sangat tergantung pada dana dari Pemerintah Pusat. Selain itu, pengetahuan pengguna BMD dan aparaturnya tentang pengelolaan barang milik daerah masih perlu ditingkatkan.

4. Rendahnya PAD yang mengindikasikan rendahnya kemandirian daerah terhadap pusat.

Belum tergali dan terkelolanya potensi daerah secara optimal sebagai sumber PAD, menjadi penyebab rendahnya PAD. Kondisi wilayah Lampung Barat yang relatif luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya menggali dan mengelola potensi daerah, hal ini berkaitan dengan kepercayaan investor.

Selanjutnya, meskipun pada masa Renstra yang lalu target PAD selalu tercapai, namun kondisi wilayah Lampung Barat yang luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah yang rawan bencana alam, dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan penagihan PAD pada tahun-tahun yang akan datang. Karena realisasi PAD menjadi salah satu dasar dalam penganggaran PAD, maka hal ini relevan terhadap isu strategis poin 1 ini.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang memuat pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang ditetapkan. Tujuan BPKD adalah “Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat”.

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya menjadi efisien dan efektif. Sasaran BPKD adalah “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah”.

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKD dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-					Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Predikat Opini).	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
									2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.	100%	100%	100%	100%	100%
									3. Persentase peningkatan PAD.	3%	3%	3%	3%	3%

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang harus dan akan dilaksanakan.

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta kondisi lingkungan yang dihadapi, maka strategi yang akan dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran;
2. Melaksanakan penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat;
3. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai yang tepat waktu dan akurat;
4. Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh OPD;
5. Melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan yang tepat waktu dan akurat;
6. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu;
7. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017;
8. Melaksanakan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB secara intensif sehingga target PAD tercapai, serta melakukan ekstensifikasi potensi PAD untuk meningkatkan PAD.

Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penganggaran APBD;
2. Percepatan proses pencairan dana;
3. Pembayaran gaji pegawai yang tepat waktu dan akurat;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah seluruh OPD;
5. Penyusunan dokumen pelaporan yang tepat waktu dan akurat;
6. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
7. Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan;
8. Peningkatan PAD hingga 3% per tahun.

Untuk melihat relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2017-2022 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan BPKD, berikut adalah rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPKD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana tertuang di dalam Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2017-2022

VISI : Terwujudnya Lampung Barat Hebat dan Sejahtera			
MISI IV : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1. Melaksanakan penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.	1. Peningkatan kualitas penganggaran APBD.
		2. Melaksanakan penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat.	2. Percepatan proses pencairan dana.
		3. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai yang tepat waktu dan akurat.	3. Pembayaran gaji pegawai yang tepat waktu dan akurat.
		4. Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh OPD.	4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah seluruh OPD.
		5. Melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan yang tepat waktu dan akurat.	5. Penyusunan dokumen pelaporan yang tepat waktu dan akurat.
		6. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu.	6. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		7. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.	7. Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan.
		8. Melaksanakan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB secara intensif sehingga target PAD tercapai, serta melakukan ekstensifikasi potensi PAD untuk meningkatkan PAD.	8. Peningkatan PAD hingga 3 % per tahun.

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada kurun waktu 2017-2022, BPKD Kabupaten Lampung Barat memiliki program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022. Program pembangunan tersebut diaplikasikan melalui berbagai kegiatan yang merupakan lokalitas kewenangan BPKD Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat beserta indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2018-2022 secara lengkap dapat dilihat pada lembar Lampiran.

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, maka indikator kinerja BPKD yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut adalah sebagai berikut :

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan target WTP;
2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017, dengan target 100%;
3. Persentase peningkatan PAD, dengan target 3%.

Indikator kinerja BPKD selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2017-2022

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase peningkatan PAD.	153,95%	3%	3%	3%	3%	3%	15%

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisi langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah dan mencapai target pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, serta Program di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Renstra OPD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD.

Renstra OPD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembangunan daerah, agar memiliki arah yang jelas, terarah, dan berkesinambungan. Maksud ditetapkannya Renstra ini adalah agar OPD dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah, yang meliputi pelaksanaan pelayanan administratif kepada perangkat daerah lainnya, serta pelayanan publik kepada masyarakat. Renstra ini disusun dalam rangka membantu mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut. Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat adalah “Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera”, dan Misi yang diemban oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik”.

Demikianlah Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 Edisi Revisi ini disusun sebagai pedoman dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada organisasi berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu, perlu dukungan dan peran aktif seluruh aparatur BPKD serta partisipasi *stake holder* dalam pelaksanaannya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. DAMAN NASIR, M.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680701 198901 1 002

L A M P I R A N

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2017-2022

Misi Yang Diemban : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.

NO	SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda diberikan oleh/menjadi hak dan kewenangan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Dokumen-dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan Kabupaten Lampung Barat
		2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.	Ada 11 variabel, dengan formula : $\frac{\text{Jumlah variabel yang dipenuhi}}{11} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen dan data Bidang Barang Milik Daerah
		3. Persentase peningkatan PAD.	$\frac{\text{Jumlah anggaran PAD tahun ini} - \text{Jumlah anggaran PAD tahun lalu}}{\text{Jumlah anggaran PAD tahun lalu}} \times 100\%$	3%	3%	3%	3%	3%	APBD, APBDP, Laporan Penerimaan Daerah

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Kode	Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
					Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	TUJUAN																			
	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Predikat Opini)	WTP	WTP	10.373.294.700	WTP	9.243.415.400	WTP	10.590.479.880	WTP	11.715.824.244	WTP	12.661.479.918	WTP	54.584.494.142				
	SASARAN STRATEGIS																			
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	10.373.294.700	WTP	9.243.415.400	WTP	10.590.479.880	WTP	11.715.824.244	WTP	12.661.479.918	WTP	54.584.494.142				
			Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah	21%	3%		3%		3%		3%		3%		15%					
			Persentase peningkatan PAD	43,80%	3%		3%		3%		3%		3%		15%					
0	NON URUSAN																			
0	Non Urusan																			
0	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	100%	100%	692.459.800	100%	646.959.800	100%	677.075.200	100%	684.565.200	100%	3.387.925.200			Kabupaten Lampung Barat	
0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk	2350 Surat	471 Surat	4.909.000	475 Surat	4.909.000	477 Surat	4.909.000	480 Surat	4.909.000	482 Surat	24.545.000	2385 Surat	24.545.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Surat Keluar	7235 Surat	1449 Surat		1450 Surat		1453 Surat		1455 Surat		1458 Surat	7265 Surat	7265 Surat	555.600.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telepon (Termasuk Speedy)	2 Rekening	2 Rekening	111.120.000	2 Rekening	111.120.000	2 Rekening	111.120.000	2 Rekening	111.120.000	2 Rekening	111.120.000	2 Rekening	555.600.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Rekening Air	1 Rekening	1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening	1 Rekening	1 Rekening		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Rekening Listrik	4 Rekening	4 Rekening		4 Rekening		4 Rekening		4 Rekening		4 Rekening	4 Rekening	4 Rekening		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil Yang Dibayar KIRnya	1 Unit	1 Unit	57.289.600	1 Unit	13.589.600	1 Unit	20.675.000	1 Unit	20.675.000	1 Unit	132.904.200	1 Unit	132.904.200	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil Yang Dibayar Pajaknya	6 Unit	6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit				BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Motor Yang Dibayar Pajaknya	24 Unit	25 Unit		25 Unit		25 Unit		25 Unit		25 Unit				BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil Yang Diherregistrasi	45 Unit	6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit				BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Motor Yang Diherregistrasi	0 Unit	0 Unit		0 Unit		9 Unit		8 Unit		8 Unit				BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Buku Cek	Jumlah Buku Cek	18 Buku	10 Buku	500.000	12 Buku	1.500.000	12 Buku	1.650.000	12 Buku	1.650.000	12 Buku	1.650.000	58 Buku	6.950.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	2 Orang	2 Orang	12.484.200	2 Orang	12.484.200	2 Orang	12.484.200	2 Orang	12.484.200	2 Orang	12.484.200	2 Orang	62.421.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor	70 Jenis	14 Jenis		14 Jenis		13 Jenis		13 Jenis		13 Jenis		67 Jenis		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK	130 Jenis	25 Jenis	52.907.000	24 Jenis	52.907.000	18 Jenis	52.907.000	18 Jenis	52.907.000	18 Jenis	52.907.000	103 Jenis	264.535.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan	70 Jenis	13 Jenis	117.490.000	12 Jenis	117.490.000	9 Jenis	117.490.000	9 Jenis	117.490.000	9 Jenis	117.490.000	52 Jenis	587.450.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah Jenis Penggandaan	5 Jenis	1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		5 Jenis		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	5 Jenis	1 Jenis	6.000.000	1 Jenis	6.000.000	5 Jenis	6.000.000	5 Jenis	6.000.000	5 Jenis	6.000.000	17 Jenis	30.000.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Jumlah SKHU	4 SKHU	4 SKHU	3.960.000	4 SKHU	3.960.000	4 SKHU	3.960.000	4 SKHU	3.960.000	4 SKHU	3.960.000	4 SKHU	19.800.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat	0 Kali	0 Kali	18.000.000	0 Kali	18.000.000	12 Kali	18.000.000	12 Kali	18.000.000	12 Kali	18.000.000	36 Kali	90.000.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu	60 Kali	12 Kali		12 Kali		60 Kali		60 Kali		60 Kali		204 Kali		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	Jumlah Penyediaan Makan Minum Insidentil	60 Kali	12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		60 Kali		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	60 Bulan	12 Bulan	290.000.000	12 Bulan	290.000.000	12 Bulan	301.400.000	12 Bulan	303.700.000	12 Bulan	306.000.000	60 Bulan	1.491.100.000	BPKD	Seluruh Indonesia
0	1	20	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	Terlaksananya pameran pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Pameran	4 Kali	1 Kali	7.800.000	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000	5 Kali	47.800.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	21	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	60 Bulan	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	10.380.000	12 Bulan	15.570.000	12 Bulan	15.570.000	60 Bulan	56.520.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	53	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	1 Orang	6.100.000	1 Orang	6.100.000	1 Orang	6.100.000	1 Orang	18.300.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur yang memadai	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	376.935.000	100%	366.935.000	100%	428.795.000	100%	445.295.000	100%	460.295.000	100%	2.078.255.000		Kabupaten Lampung Barat
0	1	2	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	Terlaksananya pengadaan komputer/jaringan komputer	Jumlah Komputer Notebook	2 Unit	1 Unit	10.000.000	0 Unit	0	0 Unit	8.500.000	0 Unit	10.000.000	0 Unit	10.000.000	1 Unit	38.500.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	2	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	Terlaksananya pengadaan komputer/jaringan komputer	Jumlah Komputer/PC	3 Unit	0 Unit		0 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		3 Unit		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	10 Gedung	10 Gedung	43.595.000	10 Gedung	43.595.000	10 Gedung	43.595.000	10 Gedung	43.595.000	10 Gedung	43.595.000	10 Gedung	217.975.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat

Kode	Tujuan/Sasaran/Urusan/Bidang Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
					Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
0	1	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil Yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	282.840.000	6 Unit	282.840.000	6 Unit	335.800.000	6 Unit	350.800.000	6 Unit	365.800.000	6 Unit	1.618.080.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
					Jumlah Motor Yang Dipelihara	24 Unit	25 Unit		25 Unit		25 Unit		25 Unit		25 Unit		25 Unit		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
					Jumlah Mobil Yang Diservis Berat	5 Unit	0 Unit		0 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		6 Unit		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Jumlah Komputer/PC Yang Dipelihara	5 Unit	1 Unit	40.500.000	1 Unit	40.500.000	5 Unit	40.900.000	5 Unit	40.900.000	5 Unit	40.900.000	17 Unit	203.700.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
					Jumlah Laptop Yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit		1 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		31 Unit		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
					Jumlah Mesin Tik Yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit		0 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		15 Unit		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
					Jumlah Genset Yang Dipelihara	5 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		5 Unit		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
					Jumlah AC Yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit		0 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		12 Unit		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
					Jumlah Kamera Foto Yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit		0 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		12 Unit		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
					Jumlah Sound System Yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit		0 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		3 Unit		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
					Jumlah Mesin Rumpung Yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit		0 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		3 Unit		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
					Jumlah Printer Yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit		0 Unit		16 Unit		16 Unit		16 Unit		48 Unit		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan	100%	20%	358.396.000	20%	245.448.000	20%	245.113.000	20%	259.624.300	20%	275.586.730	100%	1.384.168.030		Kabupaten Lampung Barat
0	1	5	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	30 Orang	6 Orang	100.000.000	6 Orang	100.000.000	6 Orang	100.000.000	6 Orang	100.000.000	6 Orang	100.000.000	30 Orang	500.000.000	BPKD	Seluruh Indonesia
0	1	5	64 Forum Diskusi Akuntansi (FDA)	Terlaksananya Forum Diskusi Akuntansi (FDA)	Jumlah Peserta Diskusi	800 Orang	148 Orang	98.987.000	148 Orang	41.311.000	148 Orang	45.297.000	148 Orang	49.826.700	148 Orang	54.809.370	740 Orang	290.231.070	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	5	65 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic	Jumlah Peserta Bimtek	590 Orang	148 Orang	159.409.000	148 Orang	104.137.000	148 Orang	99.816.000	148 Orang	109.797.600	148 Orang	120.777.360	740 Orang	593.936.960	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	1.387.740.000	100%	1.998.660.000	100%	2.276.380.000	100%	2.581.835.000	100%	2.906.835.000	100%	11.151.450.000		Kabupaten Lampung Barat
0	1	6	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	3.750.000	12 Dokumen	4.430.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000	60 Dokumen	23.180.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	6	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	10 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	685.000	2 Dokumen	905.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	10 Dokumen	4.590.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	6	3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	1.195.000	1 Dokumen	1.055.000	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.200.000	5 Dokumen	6.650.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	6	4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	2.390.000	1 Dokumen	1.055.000	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.200.000	5 Dokumen	13.345.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	6	8 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Terlaksananya penyusunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan SKPD	126 Dokumen	26 Dokumen	9.040.000	25 Dokumen	1.840.000	25 Dokumen	3.735.000	25 Dokumen	8.235.000	25 Dokumen	8.235.000	126 Dokumen	31.085.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	6	10 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	190 Orang	71 Orang	1.338.200.000	96 Orang	1.988.800.000	96 Orang	2.265.200.000	98 Orang	2.565.200.000	98 Orang	2.865.200.000	459 Orang	11.022.600.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	6	14 Penetapan Renstra SKPD 2017-2022	Terlaksananya Penetapan Renstra SKPD 2017-2022	Jumlah Dokumen Renstra SKPD 2017-2022	0 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	25.000.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
0	1	6	15 Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Tahun 2022-2027	Tersusunnya Rancangan Renstra SKPD Tahun 2022-2027	Jumlah Dokumen Rancangan Renstra SKPD 2022-2027	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4			URUSAN PENUNJANG																	
4	2		Keuangan																	
4	2	15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Persentase penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran	100%	100%	5.544.817.900	100%	2.383.264.100	100%	3.521.915.940	100%	3.620.716.878	100%	3.833.521.690	100%	18.904.236.508		Kabupaten Lampung Barat
					Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Kabupaten Lampung Barat
					Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Kabupaten Lampung Barat
					Nilai rata-rata hasil pembinaan pengelolaan keuangan daerah	71,14 Poin	73 Poin		75 Poin		78 Poin		80 Poin		81 Poin		81 Poin			Kabupaten Lampung Barat
					Persentase penyusunan dokumen pelaporan yang tepat waktu dan akurat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Kabupaten Lampung Barat
					Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Kabupaten Lampung Barat
4	2	15	2 Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya Standar Satuan Harga Pemkab Lampung Barat	Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat	75 Eks	60 Eks	95.561.000	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	60 Eks	95.561.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat

Kode	Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
					Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target			Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 2 15 6	Penyusunan Rancangan APBD	Tersusunnya Rancangan APBD Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku APBD	500 Eks	100 Eks	464.545.000	100 Eks	387.180.000	100 Eks	615.295.000	100 Eks	636.399.500	100 Eks	657.504.000	500 Eks	2.760.923.500	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah Buku Penjabaran APBD	1500 Eks	300 Eks		300 Eks		300 Eks		300 Eks		300 Eks		1500 Eks		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah DPA OPD	11360 Eks	2350 Eks		2350 Eks		2350 Eks		2350 Eks		2350 Eks		11750 Eks		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 8	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Perubahan APBD	500 Eks	100 Eks	473.910.000	100 Eks	400.845.000	100 Eks	624.910.000	100 Eks	644.910.000	100 Eks	664.910.000	500 Eks	2.809.485.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD	1500 Eks	300 Eks		300 Eks		300 Eks		300 Eks		300 Eks		1500 Eks		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah DPPA OPD	11360 Eks	2350 Eks		2350 Eks		2350 Eks		2350 Eks		2350 Eks		11750 Eks		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Buku Ranperda Realisasi APBD	400 Eks	80 Eks	311.147.000	80 Eks	247.819.000	80 Eks	312.045.000	80 Eks	327.045.000	80 Eks	342.045.000	400 Eks	1.540.101.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah Buku Ranperbup Realisasi APBD	400 Eks	80 Eks		80 Eks		80 Eks		80 Eks		80 Eks		400 Eks		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah Buku Perda Realisasi APBD	480 Eks	100 Eks		100 Eks		110 Eks		110 Eks		110 Eks		530 Eks		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah Buku Perbup Realisasi APBD	480 Eks	100 Eks		100 Eks		110 Eks		110 Eks		110 Eks		530 Eks		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 18	Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah	Terlaksananya penilaian barang milik daerah yang objektif	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	0 Eks	15 Eks	161.550.000	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	15 Eks	161.550.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 20	Penyusunan Administrasi Gaji Aparatur dan Pembuatan Daftar Gaji	Tersusunnya daftar gaji dan terisinya kartu gaji pegawai setiap bulan	Jumlah Daftar Gaji Bulanan	2856 Eks	528 Eks	303.671.400	528 Eks	311.571.500	528 Eks	369.377.000	528 Eks	384.377.000	528 Eks	399.377.000	2640 Eks	1.768.373.900	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah kartu gaji	27390 Lembar	4550 Lembar		4550 Lembar		5000 Lembar		5000 Lembar		5000 Lembar		24100 Lembar		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 21	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Per Semester	Tersusunnya Laporan Realisasi APBD Per Semester	Jumlah Buku Laporan Realisasi APBD Per Semester	150 Eks	30 Eks	154.438.000	30 Eks	171.539.000	60 Eks	171.539.000	60 Eks	181.491.000	60 Eks	191.491.000	240 Eks	870.498.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 22	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Draft Laporan Keuangan	600 Eks	125 Eks	510.074.000	125 Eks	194.783.000	125 Eks	214.261.300	125 Eks	235.687.430	125 Eks	259.256.173	625 Eks	1.414.061.903	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah Buku Laporan Keuangan	510 Eks	80 Eks		80 Eks		80 Eks		80 Eks		80 Eks		400 Eks		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah Buku Pidato Pengantar LKPD	100 Set	50 Set		50 Set		50 Set		50 Set		50 Set		250 Set		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 23	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD	Tercapainya pemahaman aparat dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan	Nilai Rata-Rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	71,14 Poin	73 Poin	94.370.000	75 Poin	43.400.000	78 Poin	55.390.000	80 Poin	60.390.000	81 Poin	65.390.000	81 Poin	318.940.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 24	Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Tersusunnya Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA SKPD	500 Eks	100 Eks	27.023.000	100 Eks	22.447.000	100 Eks	29.287.000	100 Eks	32.287.000	100 Eks	35.287.000	500 Eks	146.331.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 25	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD	500 Eks	100 Eks	24.801.000	100 Eks	25.680.000	100 Eks	35.990.000	100 Eks	39.590.000	100 Eks	43.190.000	500 Eks	169.251.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 27	Labeling dan Registrasi Aset Daerah	Tertibnya administrasi pengelolaan BMD	Jumlah Plang Kepemilikan Tanah	55 Unit	50 Unit	186.300.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	50 Unit	186.300.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 28	Operasional Panitia Penghapusan Barang	Tertibnya penatausahaan penghapusan barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) terhapus dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, keputusan pengadilan, peraturan perundangan, dan pemusnahan), dari usulan OPD	100%	100%	84.150.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	84.150.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 29	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Jumlah LBMD Pemda	6 Eks	6 Eks	63.961.000	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	6 Eks	63.961.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah LBMD OPD	0 Eks	44 Eks		0 Eks		0 Eks		0 Eks		0 Eks		44 Eks		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah DBMD Pemda	0 Eks	6 Eks		0 Eks		0 Eks		0 Eks		0 Eks		6 Eks		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 30	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	Tersusunnya Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	Jumlah Laporan Triwulan Dana TP dan UB	56 Eks	56 Eks	22.720.000	56 Eks	24.026.000	56 Eks	24.810.240	56 Eks	25.554.547	56 Eks	26.321.184	280 Eks	123.431.971	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah Laporan Akhir Tahun Dana TP dan UB	48 Eks	14 Eks		14 Eks		14 Eks		14 Eks		14 Eks		70 Eks		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 32	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Tersedianya aplikasi yang terintegrasi (perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan)	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	100%	100%	367.405.000	100%	107.846.200	100%	283.267.000	100%	311.593.700	100%	342.753.070	100%	1.412.864.970	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 34	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Draft Laporan Keuangan SKPD	698 Eks	135 Eks	132.865.000	135 Eks	136.547.000	135 Eks	182.618.000	135 Eks	146.547.000	135 Eks	156.547.000	675 Eks	755.124.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD	771 Eks	135 Eks		135 Eks		135 Eks		135 Eks		135 Eks		675 Eks		BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 36	Rekonsiliasi/Pembaharuan Data PNSD	Tersedianya data PNSD yang akurat setiap bulan	Persentase data PNSD yang akurat sebagai dasar pembayaran gaji setiap bulan	100%	100%	44.742.000	100%	31.626.000	100%	41.774.000	100%	46.774.000	100%	51.774.000	100%	216.690.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 42	Asistensi Implementasi SAP Berbasis Acrua	Tercapainya pemahaman SKPD dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual	Jumlah SKPD yang diasistansi	45 OPD	44 OPD	190.617.000	44 OPD	38.422.400	44 OPD	41.702.400	44 OPD	45.702.400	44 OPD	49.702.400	44 OPD	366.146.600	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 44	Administrasi Pelaporan Dana Transfer dan DAK	Terlaksananya pelaporan penyerapan Dana Transfer tepat waktu	Persentase Realisasi Dana Transfer	97,32%	100%	58.520.000	100%	67.283.000	100%	80.107.000	100%	89.001.681	100%	98.001.681	100%	392.913.362	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 45	Administrasi Pengelolaan Keuangan BUD	Terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan BUD yang baik	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	100%	100%	95.614.000	100%	103.382.000	100%	123.249.000	100%	135.417.620	100%	148.959.382	100%	606.622.002	BPKD	Kabupaten Lampung Barat

Kode	Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
					Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 2 15 47	Pengendalian dan Pengawasan BMD	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan BMD	Persentase BMD yang terkendali dan terawasi	100%	100%	59.849.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	59.849.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 48	Penerapan Sistem Informasi BMD	Tersedianya data dan informasi BMD berbasis sistem informasi	Persentase input data BMD tepat waktu dan akurat	100%	100%	383.570.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	383.570.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 49	Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana DAK	Tersedianya data realisasi Dana Alokasi Khusus yang akurat	Persentase Realisasi Dana Alokasi Khusus	91,95%	100%	108.167.000	100%	68.867.000	100%	102.474.000	100%	108.167.000	100%	114.167.000	100%	501.842.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 50	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Tersedianya Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna	Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna/OPD	0 Eks	45 Eks	235.000.000	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	45 Eks	235.000.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 51	Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	Meningkatnya PAD	Persentase Peningkatan PAD	0%	3%	40.523.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	3%	40.523.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 52	Inventarisasi Aset Daerah	Tersedianya data BMD	Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi BMD	0 Eks	45 Eks	150.000.500	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	45 Eks	150.000.500	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 53	Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tercapainya pemahaman OPD dalam pelaksanaan penatausahaan BMD sesuai peraturan perundangan	Jumlah OPD yang diasistensi	0 OPD	44 OPD	86.249.000	0 OPD	0	0 OPD	0	0 OPD	0	0 OPD	0	44 OPD	86.249.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 54	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 Eks	60 Eks	275.313.000	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	60 Eks	275.313.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 55	Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	0 Eks	100 Eks	182.266.000	0 Eks	0	100 Eks	132.676.000	0 Eks	0	0 Eks	0	200 Eks	314.942.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 56	Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan SIKD	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan	0 Orang	211 Orang	155.896.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	211 Orang	155.896.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 57	Sosialisasi dan Pelatihan Peraturan Keuangan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan Peraturan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	132 Orang	81.144.000	132 Orang	89.144.000	132 Orang	98.144.000	396 Orang	268.432.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 15 59	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan dan Kas Daerah Harian	Tersusunnya Laporan Realisasi APBD Bulanan dan Kas Daerah Harian	Jumlah Laporan Realisasi APBD Bulanan	0 Eks	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	12 Eks	26.532.000	12 Eks	29.185.200	24 Eks	55.717.200	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah Laporan Kas Daerah Harian	0 Eks	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	240 Eks	240 Eks	240 Eks	240 Eks	480 Eks			
4 2 15 60	Pengumpulan Data dan Validasi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD	Tersedianya data yang akurat dan dokumen yang valid sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Validasi	0 Eks	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	10 Eks	54.106.000	10 Eks	59.516.600	20 Eks	113.622.600	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 18	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100%	0%	0	100%	1.886.569.500	100%	1.679.044.440	100%	1.830.044.440	100%	1.981.044.440	100%	7.376.702.820		Kabupaten Lampung Barat
4 2 18 1	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya Standar Satuan Harga Pemkab Lampung Barat	Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat	245 Eks	0 Eks	0	60 Eks	95.561.000	55 Eks	95.561.000	55 Eks	104.561.000	55 Eks	113.561.000	225 Eks	409.244.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 18 2	Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah	Terlaksananya penilaian barang milik daerah yang objektif	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	80 Eks	0 Eks	0	15 Eks	256.550.000	4 Eks	164.781.000	25 Eks	172.781.000	25 Eks	180.781.000	69 Eks	774.893.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Kembali BMD	0 Eks	0 Eks	0	2 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	0	2 Eks	0	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 18 3	Labeling dan Registrasi Aset Daerah	Tertibnya administrasi pengelolaan BMD	Jumlah Plang Kepemilikan Tanah	185 Unit	0 Unit	0	40 Unit	180.855.000	45 Unit	190.026.000	45 Unit	200.026.000	45 Unit	210.026.000	175 Unit	780.933.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah Plang Larangan	25 Unit	0 Unit	0	10 Unit	0	12 Unit	0	12 Unit	0	12 Unit	0	46 Unit	0	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah Plang Kepemilikan Tanah Yang Terpelihara	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	45 Unit	0	45 Unit	0	45 Unit	0	135 Unit	0	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah Plang Larangan Yang Terpelihara	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	12 Unit	0	12 Unit	0	12 Unit	0	36 Unit	0	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 18 4	Operasional Panitia Penghapusan Barang	Tertibnya penatausahaan penghapusan barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) terhapus dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, keputusan pengadilan, peraturan perundangan, dan pemusnahan), dari usulan OPD	100%	0%	0	100%	84.150.000	100%	85.883.000	100%	90.883.000	100%	95.883.000	100%	356.799.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 18 5	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Jumlah LBMD Pemda	24 Eks	0 Eks	0	6 Eks	63.961.000	12 Eks	63.961.000	12 Eks	68.961.000	12 Eks	73.961.000	42 Eks	270.844.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah LBMD OPD	90 Eks	0 Eks	0	44 Eks	0	88 Eks	0	88 Eks	0	88 Eks	0	308 Eks	0	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
			Jumlah DBMD Pemda	12 Eks	0 Eks	0	6 Eks	0	12 Eks	0	12 Eks	0	12 Eks	0	42 Eks	0	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 18 6	Pengendalian dan Pengawasan BMD	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan BMD	Persentase BMD yang terkendali dan terawasi	100%	0%	0	100%	59.849.000	100%	61.045.980	100%	66.045.980	100%	71.045.980	100%	257.986.940	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 18 7	Penerapan Sistem Informasi BMD	Tersedianya data dan informasi BMD berbasis sistem informasi	Persentase input data BMD tepat waktu dan akurat	100%	0%	0	100%	220.370.000	100%	259.864.000	100%	309.864.000	100%	359.864.000	100%	1.149.962.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 18 8	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Tersedianya Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna	Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna/OPD	0 Eks	0 Eks	0	45 Eks	443.251.000	45 Eks	239.700.000	45 Eks	249.700.000	45 Eks	259.700.000	180 Eks	1.192.351.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 18 9	Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD	0%	0%	0	3%	40.523.000	3%	41.333.460	3%	45.333.460	3%	49.333.460	12%	176.523.380	BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4 2 18 10	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersedianya data BMD	Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi BMD	0 Eks	0 Eks	0	45 Eks	349.610.500	45 Eks	385.000.000	45 Eks	425.000.000	45 Eks	465.000.000	180 Eks	1.624.610.500	BPKD	Kabupaten Lampung Barat

Kode	Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
					Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4	2	18	11	Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tercapainya pemahaman OPD dalam pelaksanaan penatausahaan BMD sesuai peraturan perundangan	Jumlah OPD yang diasistensi	0 OPD	0 OPD	0	44 OPD	91.889.000	44 OPD	91.889.000	44 OPD	96.889.000	44 OPD	101.889.000	44 OPD	382.556.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat	
4	2	19		Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data	Tercapainya akurasi dan aktualitas data penerimaan daerah	Persentase akurasi dan aktualitas data Bidang Pendapatan Daerah	100%	100%	1.290.158.000	100%	1.133.391.000	100%	1.170.293.800	100%	1.525.140.286	100%	1.687.264.014	100%	6.806.247.100		Kabupaten Lampung Barat	
						Persentase akurasi dan aktualitas data Bidang PBB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Kabupaten Lampung Barat	
4	2	19	1	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	Optimalnya pengelolaan PBB Kabupaten Lampung Barat	Jumlah SPPT PBB P2 tersampaikan kepada seluruh Wajib Pajak	409716 Lembar	125000 Lembar	405.615.000	130000 Lembar	390.695.000	135000 Lembar	409.265.500	145000 Lembar	448.800.556	145000 Lembar	493.680.611	680000 Lembar	2.148.056.667	BPKD	Kabupaten Lampung Barat	
						Persentase data Ojek Pajak masuk ke dalam Database SISMOPIOP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4	2	19	2	Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB P2	Diperolehnya data objek PBB P2 yang mutakhir	Jumlah Objek PBB P2 yang dimutakhirkan	35951 OP	26000 OP	441.890.000	17000 OP	353.040.000	17000 OP	412.018.000	18000 OP	441.890.000	14000 OP	441.890.000	92000 OP	2.090.728.000	BPKD	Kecamatan BNS, Suoh, Air Hitam, Gedung Surian, Sekincau, Pagar Dewa, Batu Ketulis, Batu Brak, Sukau, Lumbok Semining	
4	2	19	3	Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah	Tersusunnya Laporan Penerimaan Daerah	Jumlah Feedback Laporan Bulanan	1944 Eks	300 Eks	89.500.000	300 Eks	91.900.000	480 Eks	95.000.000	480 Eks	105.000.000	480 Eks	115.000.000	2040 Eks	496.400.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat	
						Jumlah Feedback Laporan Triwulan	648 Eks	100 Eks		100 Eks		160 Eks		160 Eks		160 Eks		680 Eks			BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4	2	19	4	Analisis dan Umpan Balik Atas Realisasi PBB	Tersusunnya Laporan Realisasi PBB seluruh Kecamatan setiap bulan	Jumlah Buku Laporan Bulanan	920 Eks	170 Eks	24.385.000	170 Eks	25.090.000	170 Eks	27.624.300	170 Eks	30.386.730	170 Eks	33.425.403	850 Eks	140.911.433	BPKD	Kabupaten Lampung Barat	
4	2	19	5	Penyusunan Anggaran PAD	Tersusunnya Anggaran PAD Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Draft Rancangan Anggaran PAD	100 Eks	50 Eks	62.260.000	50 Eks	65.000.000	50 Eks	68.000.000	50 Eks	75.000.000	50 Eks	82.000.000	250 Eks	352.260.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat	
						Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD	170 Eks	50 Eks		50 Eks		50 Eks		50 Eks		50 Eks		250 Eks			BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4	2	19	6	Penyusunan Perubahan Anggaran PAD	Tersusunnya Anggaran Perubahan PAD Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD	100 Eks	50 Eks	62.642.000	50 Eks	67.500.000	50 Eks	72.500.000	50 Eks	79.700.000	50 Eks	87.670.000	250 Eks	370.012.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat	
						Jumlah Buku Rancangan Anggaran Perubahan PAD	175 Eks	50 Eks		50 Eks		50 Eks		50 Eks		50 Eks		250 Eks			BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4	2	19	9	Rekonsiliasi Penerimaan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi	Tersempainya Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah	Persentase Penyerapan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi	0%	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	47.386.000	100%	52.386.000	100%	57.386.000	100%	252.158.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat	
4	2	19	10	Peremajaan Data Potensial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersusunnya data potensi PAD Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Draft Himpunan Data Potensi PAD	50 Eks	50 Eks	125.875.000	0 Eks	0	0 Eks	0	0 Eks	249.627.000	50 Eks	259.627.000	100 Eks	635.129.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat	
						Jumlah Buku Himpunan Data Potensi PAD	50 Eks	50 Eks		0 Eks		0 Eks		0 Eks		50 Eks		100 Eks			BPKD	Kabupaten Lampung Barat
						Jumlah Draft Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT)	0 Eks	0 Eks		0 Eks		0 Eks		0 Eks		50 Eks		50 Eks			BPKD	Kabupaten Lampung Barat
						Jumlah Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT)	0 Eks	0 Eks		0 Eks		0 Eks		0 Eks		100 Eks		100 Eks			BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4	2	19	11	Penatausahaan Pendapatan Daerah dan Piutang Pendapatan Daerah	Tersusunnya Data Piutang Pendapatan Daerah	Jumlah Buku Piutang Pendapatan Kabupaten Lampung Barat	0 Eks	25 Eks	32.991.000	50 Eks	35.000.000	50 Eks	38.500.000	50 Eks	42.350.000	50 Eks	46.585.000	225 Eks	195.426.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat	
4	2	19	12	Penyusunan NPWPD dan NPWRD Kabupaten Lampung Barat	Tersusunnya Data NPWPD dan NPWRD Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Induk NPWPD Kabupaten Lampung Barat	50 Eks	0 Eks	0	50 Eks	55.166.000	0 Eks	0	0 Eks	0	50 Eks	70.000.000	100 Eks	125.166.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat	
						Jumlah Buku Induk NPWRD Kabupaten Lampung Barat	50 Eks	0 Eks		50 Eks		0 Eks		0 Eks		50 Eks		100 Eks			BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4	2	20		Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB	Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah serta PBB untuk membayar pajak	Persentase Wajib PBB yang membayar pajak	100%	100%	90.613.000	100%	179.903.000	100%	132.906.400	100%	271.197.040	100%	292.066.744	100%	966.686.184		Kabupaten Lampung Barat	
						Persentase Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang membayar pajak	0%	0%		0%		0%		100%		100%		100%				Kabupaten Lampung Barat
4	2	20	1	Publikasi Pajak dan Retribusi	Terlaksananya publikasi untuk membayar	Jumlah Balih	21 Buah	4 Buah	90.613.000	8 Buah	179.903.000	9 Buah	132.906.400	10 Buah	146.197.040	11 Buah	160.816.744	42 Buah	710.436.184	BPKD	Kabupaten Lampung Barat	
						Jumlah Banner Sosialisasi	687 Buah	168 Buah		168 Buah		319 Buah		319 Buah		319 Buah		1293 Buah			BPKD	Kabupaten Lampung Barat
						Jumlah Display Balih	4 Buah	0 Buah		3 Buah		1 Buah		1 Buah		1 Buah		6 Buah			BPKD	Kabupaten Lampung Barat
4	2	20	3	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	300 Orang	125.000.000	300 Orang	131.250.000	600 Orang	256.250.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat	
4	2	21		Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB	Tercapainya kelancaran penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi PAD	103,89%	100%	632.175.000	100%	402.285.000	100%	458.956.100	100%	497.406.100	100%	538.001.100	100%	2.528.823.300		Kabupaten Lampung Barat	
						Persentase Realisasi PBB	101,54%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				Kabupaten Lampung Barat
4	2	21	1	Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tercapainya target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	107,50%	100%	190.200.000	100%	195.000.000	100%	214.500.000	100%	235.950.000	100%	259.545.000	100%	1.095.195.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat	
4	2	21	2	Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD	Tercapainya target PAD	Persentase Realisasi PAD	103,89%	100%	75.000.000	100%	51.870.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	351.870.000	BPKD	Kabupaten Lampung Barat	
4	2	21	3	Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	Tercapainya target PBB	Persentase Realisasi PBB	101,54%	100%	366.975.000	100%	155.415.000	100%	169.456.100	100%	186.456.100	100%	203.456.100	100%	1.081.758.300	BPKD	Kabupaten Lampung Barat	
TOTAL									10.373.294.700		9.243.415.400		10.590.479.880		11.715.824.244		12.661.479.918		54.584.494.142			

CASCADING RENSTRA TAHUN 2017-2022 APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Uraian Renstra	Output Renstra	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Pagu 2018	Pagu 2019	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Perangkat Daerah
NON URUSAN												
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Indikator Program : Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan												
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	38 Dokumen	38 Dokumen	38 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	45.020.000	11.570.000	14.145.000	24.210.000	24.210.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	34.040.000	1.840.000	3.735.000	1.365.000	1.365.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	1.870.000	1.870.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	1.870.000	1.870.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	1.870.000	1.870.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	1.870.000	1.870.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.980.000	9.730.000	10.410.000	13.900.000	13.900.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Laporan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	0	0	0	1.465.000	1.465.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.443.536.596	5.980.610.256	6.576.989.281	7.234.386.709	7.957.523.880	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5.433.036.596	5.976.340.256	6.573.974.281	7.231.371.709	7.954.508.880	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Uraian Renstra	Output Renstra	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Pagu 2018	Pagu 2019	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000	2.390.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	685.000	905.000	905.000	905.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1.195.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	0	4.904.000	4.904.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	0	4.904.000	4.904.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0	35.920.000	35.920.000	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Laporan Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0	35.920.000	35.920.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang meningkat disiplin dan kapasitasnya	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	60.000.000	60.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	60.000.000	60.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya	7 Sub Organisasi	7 Sub Organisasi	7 Sub Organisasi	7 Sub Organisasi	7 Sub Organisasi	429.470.000	429.470.000	221.004.000	222.827.000	222.827.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	1 Jenis	1 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.983.000	5.983.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	13 Jenis	12 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	117.490.000	117.490.000	76.610.000	76.610.000	76.610.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Uraian Renstra	Output Renstra	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Pagu 2018	Pagu 2019	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Perangkat Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	4 SKHU	4 SKHU	4 SKHU	4 SKHU	4 SKHU	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu	60 Kali	60 Kali	60 Kali	60 Kali	60 Kali	12.020.000	12.020.000	2.300.000	4.140.000	4.140.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	290.000.000	290.000.000	132.134.000	132.134.000	132.134.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah pengadaan peralatan kantor	1 Unit	0 Unit	1 Unit	28 Unit	2 Unit	10.000.000	0	10.000.000	226.958.000	10.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Unit	0 Unit	1 Unit	28 Unit	2 Unit	10.000.000	0	10.000.000	226.958.000	10.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Organisasi yang ditunjang urusan pemerintahannya	7 Sub Organisasi	7 Sub Organisasi	7 Sub Organisasi	7 Sub Organisasi	7 Sub Organisasi	2.000.112.020	3.863.686.868	3.862.186.868	3.645.228.868	3.862.186.868	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1920 Surat	1925 Surat	1930 Surat	1935 Surat	1940 Surat	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon (Termasuk Speedy) 2 Rekening, Jumlah Rekening Air 1 Rekening, Jumlah Rekening Listrik 4 Rekening	7 Rekening	7 Rekening	7 Rekening	7 Rekening	7 Rekening	103.350.000	103.350.000	103.350.000	103.350.000	103.350.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sub Organisasi yang ditunjang urusan pemerintahannya	7 Sub Organisasi	7 Sub Organisasi	7 Sub Organisasi	7 Sub Organisasi	7 Sub Organisasi	1.891.862.020	3.755.436.868	3.753.936.868	3.536.978.868	3.753.936.868	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Uraian Renstra	Output Renstra	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Pagu 2018	Pagu 2019	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Perangkat Daerah
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	410.347.000	410.347.000	403.057.000	390.657.000	390.657.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Yang Dilaksanakan Pemeliharaan dan Perijinan 6 Unit, Jumlah Motor Yang Dilaksanakan Pemeliharaan dan Perijinan 26 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	332.027.000	332.027.000	354.977.000	332.027.000	332.027.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	26 Unit	3 Unit	47 Unit	43 Unit	43 Unit	34.725.000	34.725.000	24.175.000	34.725.000	34.725.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	10 Gedung	10 Gedung	10 Gedung	10 Gedung	10 Gedung	43.595.000	43.595.000	23.905.000	23.905.000	23.905.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
KEUANGAN												
Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												
Indikator Program : Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran 100%, Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran 100%, Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat 100%, Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat 100%, Persentase manajemen/pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien 100%, Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu 100%												
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan, Jumlah Buku APBD dan Buku Perubahan APBD, Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD dan Buku Rancangan Anggaran Perubahan PAD	280 Eksemplar	280 Eksemplar	280 Eksemplar	600 Eksemplar	600 Eksemplar	1.423.322.000	968.652.000	1.459.197.000	1.425.775.000	1.451.634.000	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	0 Eksemplar	0 Eksemplar	0 Eksemplar	160 Eksemplar	160 Eksemplar	0	0	0	150.000.000	168.874.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	0 Eksemplar	0 Eksemplar	0 Eksemplar	160 Eksemplar	160 Eksemplar	0	0	0	150.000.000	156.985.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Uraian Renstra	Output Renstra	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Pagu 2018	Pagu 2019	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Buku APBD 90 Eksemplar, Jumlah Buku Penjabaran APBD 360 Eksemplar, Jumlah DPA OPD 1.880 Eksemplar	2330 Eksemplar	2330 Eksemplar	2330 Eksemplar	2330 Eksemplar	2330 Eksemplar	464.545.000	387.180.000	550.900.000	387.180.000	387.180.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Buku Perubahan APBD 90 Eksemplar, Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD 360 Eksemplar, Jumlah DPPA OPD 1.880 Eksemplar	2330 Eksemplar	2330 Eksemplar	2330 Eksemplar	2330 Eksemplar	2330 Eksemplar	473.910.000	400.845.000	558.525.000	400.845.000	400.845.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA SKPD 100 Eks, Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD 100 Eks, Jumlah Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 100 Eks, Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Pokok-Pokok 132	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	234.090.000	48.127.000	279.097.000	267.075.000	267.075.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Draft Rancangan Anggaran PAD, Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD, Jumlah Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD, Jumlah Buku Rancangan Anggaran Perubahan PAD, Jumlah Draft Buku Induk ZNT, Jumlah Buku Induk ZNT	200 Eksemplar	200 Eksemplar	200 Eksemplar	350 Eksemplar	350 Eksemplar	250.777.000	132.500.000	70.675.000	70.675.000	70.675.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Uraian Renstra	Output Renstra	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Pagu 2018	Pagu 2019	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Perangkat Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat 100%, Jumlah Laporan Kas Daerah 60 Eksemplar, Persentase penyerapan Dana Transfer 100%, Jumlah Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat 50 Eksemplar, Nilai Rata-rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	783.075.400	711.129.500	535.009.000	611.720.000	611.720.000	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah OPD yang diterbitkan SPDnya	0 OPD	0 OPD	0 OPD	44 OPD	44 OPD	0	0	0	5.621.000	5.621.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase penyerapan Dana Transfer	100%	100%	100%	100%	100%	45.000.000	50.000.000	33.484.000	58.320.000	58.320.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Daftar Gaji Bulanan 528 Eksemplar, Jumlah Kartu Gaji 5000 Lembar, Jumlah BA Hasil Rekonsiliasi Data PNSD 24 Eksemplar	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	348.413.400	343.197.500	256.237.000	256.237.000	256.237.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Kas Daerah	0 Eksemplar	0 Eksemplar	0 Eksemplar	60 Eksemplar	60 Eksemplar	108.167.000	68.867.000	41.645.000	77.309.000	77.309.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat	25 Eksemplar	50 Eksemplar	50 Eksemplar	50 Eksemplar	50 Eksemplar	32.991.000	35.000.000	28.560.000	32.885.000	32.885.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Uraian Renstra	Output Renstra	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Pagu 2018	Pagu 2019	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Perangkat Daerah
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah BA Hasil Rekonsiliasi 60 eksemplar dan persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	154.134.000	170.665.000	119.693.000	160.255.000	160.255.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai Rata-Rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	73 Point	75 Point	78 Point	80 Point	80 Point	94.370.000	43.400.000	55.390.000	21.093.000	21.093.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Buku Laporan Keuangan Pemda 80 Eksemplar, Jumlah Buku Perda Realisasi APBD 110 Eksemplar, Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD 135 Eksemplar	325 Eksemplar	325 Eksemplar	325 Eksemplar	325 Eksemplar	325 Eksemplar	1.580.257.000	958.584.400	1.008.974.450	1.072.178.117	1.237.036.900	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kertas Kerja Akuntansi Per Bulan	45 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	190.617.000	38.422.400	41.698.400	64.788.400	64.788.400	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Buku Laporan Bulanan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Jumlah Buku Laporan Semester Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas, Jumlah Buku Laporan Triwulan Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Pendapatan LO dan Beban	0 Eksemplar	0 Eksemplar	0 Eksemplar	810 Eksemplar	810 Eksemplar	0	0	0	105.506.000	105.506.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Buku Laporan Realisasi APBD Per Semester, Jumlah Laporan Realisasi APBD Bulanan	30 Eksemplar	30 Eksemplar	60 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	154.438.000	171.539.000	107.146.000	127.570.000	127.570.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Uraian Renstra	Output Renstra	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Pagu 2018	Pagu 2019	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Perangkat Daerah
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Draf LKPD, Jumlah Buku LKPD, Jumlah Buku Pidato Pengantar LKPD, Jumlah Draf LK SKPD, Jumlah Buku LK SKPD, Jumlah Laporan Triwulan Dana TP dan UB, Jumlah Laporan Akhir Tahun Dana TP dan UB	590 Eksemplar	590 Eksemplar	540 Eksemplar	564 Eksemplar	564 Eksemplar	665.659.000	355.356.000	529.456.000	283.795.000	283.795.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Ranperda Realisasi APBD 80 Eks, Jumlah Buku Ranperbup Realisasi APBD 80 Eks, Jumlah Buku Perda Realisasi APBD 110 Eks, Jumlah Buku Perbup Realisasi APBD 110 Eks	380 Eksemplar	380 Eksemplar	380 Eksemplar	380 Eksemplar	380 Eksemplar	311.147.000	247.819.000	215.756.000	227.011.717	233.144.500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan atas Temuan BPK, Jumlah Dokumen Quisioner dalam Pemeriksaan BPK, Jumlah Dokumen Rencana Aksi atas Temuan Pemeriksaan BPK	0 Eksemplar	0 Eksemplar	0 Eksemplar	9 Eksemplar	9 Eksemplar	0	0	0	32.499.000	32.499.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Sidang Majelis TP TGR	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	0	0	0	120.935.000	120.935.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0 Eksemplar	0 Eksemplar	0 Eksemplar	24 Eksemplar	24 Eksemplar	0	0	0	30.612.000	30.612.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Uraian Renstra	Output Renstra	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Pagu 2018	Pagu 2019	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Perangkat Daerah
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Perbup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat	0 Eksemplar	0 Eksemplar	0 Eksemplar	0 Eksemplar	80 Eksemplar	0	0	0	0	94.427.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Perbup Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Lampung Barat	0 Eksemplar	0 Eksemplar	0 Eksemplar	0 Eksemplar	80 Eksemplar	0	0	0	0	64.299.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi	296 Orang	296 Orang	296 Orang	148 Orang	148 Orang	258.396.000	145.448.000	114.918.050	79.461.000	79.461.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	171.414.719.030	188.556.190.933	207.411.810.026	228.152.991.029	250.968.290.132	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	171.414.719.030	188.556.190.933	207.411.810.026	228.152.991.029	250.968.290.132	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	523.301.000	107.846.200	206.597.000	206.597.000	220.971.000	
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	367.405.000	107.846.200	206.597.000	206.597.000	220.971.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Sosialisasi dan Pelatihan	211 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	155.896.000	0	0	0	0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Uraian Renstra	Output Renstra	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Pagu 2018	Pagu 2019	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Perangkat Daerah
Program : PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH												
Indikator Program : Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat												
Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda, Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	12 Eksemplar	12 Eksemplar	24 Eksemplar	24 Eksemplar	24 Eksemplar	1.546.713.500	1.886.569.500	955.002.400	943.322.893	943.322.893	
Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat	60 Eksemplar	60 Eksemplar	55 Eksemplar	20 Eksemplar	20 Eksemplar	95.561.000	95.561.000	49.512.500	49.512.500	49.512.500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Input Data Barang Milik Daerah dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	383.570.000	220.370.000	54.040.000	54.040.000	54.040.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah buku Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	45 Eksemplar	45 Eksemplar	45 Eksemplar	45 Eksemplar	45 Eksemplar	150.000.500	349.610.500	322.145.000	252.155.000	252.155.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Plang Kepemilikan Tanah, Jumlah Plang Larangan, Jumlah Plang Kepemilikan Tanah Yang Terpelihara, Jumlah Plang Larangan Yang Terpelihara	50 Unit	50 Unit	114 Unit	114 Unit	114	186.300.000	180.855.000	80.059.000	92.709.000	92.709.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	15 Eksemplar	15 Eksemplar	50 Eksemplar	48 Eksemplar	48 Eksemplar	161.550.000	256.550.000	164.781.000	164.781.000	164.781.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terawasi dan terkendali	100%	100%	100%	100%	100%	59.849.000	59.849.000	35.960.000	35.960.000	35.960.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Uraian Renstra	Output Renstra	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Pagu 2018	Pagu 2019	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Perangkat Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah 100%, Persentase BMD Terhapus Dari DBMD Akibat Alasan Yang Sah (Pemindahtanganan, Keputusan Pengadilan, Peraturan Perundangan, dan Pemusnahan) Dari Usulan OPD 100%	100%	100%	100%	100%	100%	124.673.000	124.673.000	39.160.000	84.820.493	84.820.493	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna	45 Eksemplar	45 Eksemplar	45 Eksemplar	45 Eksemplar	45 Eksemplar	235.000.000	443.251.000	90.055.000	90.055.000	90.055.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah LBMD Pemda, Jumlah LBMD OPD, Jumlah DBMD Pemda	66 Eksemplar	66 Eksemplar	112 Eksemplar	112 Eksemplar	112 Eksemplar	63.961.000	63.961.000	63.960.900	63.960.900	63.960.900	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang Dibina	44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	86.249.000	91.889.000	55.329.000	55.329.000	55.329.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program : PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
Indikator Program : Persentase realisasi PAD, Persentase realisasi PBB												
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD, Persentase realisasi PBB	100%	100%	100%	100%	100%	1.684.178.000	1.498.079.000	1.052.491.800	1.361.040.400	1.431.040.400	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	100%	100%	100%	100%	100%	75.000.000	51.870.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah baliho, jumlah banner sosialisasi, jumlah display baliho	176 Buah	175 Buah	162 Buah	161 Buah	161 Buah	90.613.000	179.903.000	95.090.200	97.333.800	97.333.800	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek PBB P2 yang dimutakhirkan	26000 Objek Pajak	17000 Objek Pajak	8000 Objek Pajak	10000 Objek Pajak	10000 Objek Pajak	441.890.000	353.040.000	53.610.000	159.915.000	159.915.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Uraian Renstra	Output Renstra	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Pagu 2018	Pagu 2019	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Perangkat Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB P2 tersampaikan kepada seluruh wajib pajak 130.000 lembar, Persentase Data Objek Pajak masuk ke dalam Database SISMIO P 100%	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	405.615.000	390.695.000	363.515.500	363.515.500	363.515.500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Realisasi PBB	0%	0%	0%	100%	100%	0	0	0	200.000.000	200.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Buku Induk NPWPD Kabupaten Lampung Barat, Jumlah Buku Induk NPWRD Kabupaten Lampung Barat	0 Eksemplar	100 Eksemplar	0 Eksemplar	0 Eksemplar	100 Eksemplar	0	55.166.000	0	0	70.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Feedback Laporan Bulanan 480 Eksemplar dan Jumlah Feedback Laporan Triwulan 160 Eksemplar, Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 100 %	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	279.700.000	286.900.000	256.325.000	256.325.000	256.325.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Buku Laporan 170 Eksemplar, Persentase Realisasi PBB 100%	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	391.360.000	180.505.000	208.951.100	208.951.100	208.951.100	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah